

NASKAH PUBLIKASI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2019**



Oleh:

BENNY ADAM YUDHA ARDIYANSYAH

1500024017

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA**

2020

JOURNAL

**THE LAW ENFORCEMENT TOWARDS THE VIOLATION OF
CAMPAIGN INSTRUMENTS INSTALLATION AT GENERAL
ELECTION IN YOGYAKARTA IN 2019**



Written by:

BENNY ADAM YUDHA ARDIYANSYAH

1500024017

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements
to attain the Bachelor Degree of legal Student**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA**

2020

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

Benny Adam Yudha Ardiyansyah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum di Kota Yogyakarta tahun 2019 dan kendala Baswaslu Kota Yogyakarta dalam penegakan hukum terhadap pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum di Kota Yogyakarta tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum dan menggunakan yuridis-normatif mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum positif terhadap kasus-kasus konkrit. Data yang diperoleh peneliti dikumpulkan dan dihubungkan dengan teori-teori sehingga didapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian ini adalah dalam pemilihan umum di Kota Yogyakarta tahun 2019 Bawaslu Kota Yogyakarta berhasil melakukan penertiban terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dengan terlihat dari banyaknya jumlah temuan Alat Peraga Kampanye yang ditertibkan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta. Hambatan Bawaslu dalam penertiban alat peraga kampanye adalah perbedaan persepsi terhadap kewenangan antara Bawaslu dan Satpol PP, keterbatasan jumlah petugas penertiban, penolakan masyarakat terhadap penertiban APK dan sarana dan fasilitas penunjang dalam upaya penertiban APK.

Kata Kunci : Penegakan, Pelanggaran, Alat Peraga, Kampanye, Pemilihan Umum

THE LAW ENFORCEMENT TOWARDS THE VIOLATION OF CAMPAIGN INSTRUMENTS INSTALLATION AT GENERAL ELECTION IN YOGYAKARTA IN 2019

Benny Adam Yudha Ardiyansyah

ABSTRACT

This research was aimed to find out the law enforcement towards the violation of campaign instruments installation and the obstacles faced by Bawaslu (Election Supervisory Agency) Yogyakarta to enforce the law towards the campaign instruments installation at general election in Yogyakarta in 2019.

This was a qualitative research in accordance with legal norms and was juridical normative examining the application of rules and legal norms towards concrete cases. The data obtained were collected and matched with theories so the answers of research problems were acquired. While, the data collection techniques were through literature reviews and interviews.

The result of the study was that Bawaslu Yogyakarta succeeded in straightening the violation of campaign instruments installation out as there were a number of campaign instruments found by Bawaslu Yogyakarta. The obstacles faced by Bawaslu Yogyakarta were the different perceptions concerning the authority between Bawaslu and Satuan Polisi Pamong Praja (Public Order Enforcer), the limited number of officers, the objection of the community, and the lack of supporting tools and facilities in straightening the campaign instruments out.

Keywords : *Enforcement, Violation, Campaign Instruments, Campaign,
General Election*

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, maka kekuasaan untuk menentukan corak dan cara pemerintahan sesungguhnya berada di tangan rakyat. Kedaulatan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan UUD, yaitu oleh lembaga negara, dan oleh rakyat yang diantaranya melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan umum juga dapat dilihat sebagai mekanisme yang menghubungkan antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Pemilu juga merupakan mekanisme transformasi aspirasi politik partai menjadi kebijakan negara. Dalam praktiknya, sering dijumpai bahwa di negara yang jumlah penduduknya sedikit dan ukuran wilayahnya tidak begitu luas pun, kedaulatan rakyat itu tidak dapat berjalan secara penuh, terlebih dilakukan di negara-negara yang jumlah penduduknya banyak dengan wilayah yang sangat luas, dapat dikatakan tidak mungkin untuk menghimpun pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya suatu pemerintahan. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, tingkat kehidupan berkembang sangat kompleks dan dinamis, dengan tingkat kecerdasan warga yang tidak merata dan dengan tingkat spesialisasi antar sektor pekerjaan berkembang semakin tajam. Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni. Kompleksitas keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan melalui sistim perwakilan (*representation*).

Untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur diperlukan mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala, sehingga demokrasi dapat terjamin, dan pemerintahan yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kepentingan seluruh rakyat dapat benar-benar bekerja efektif dan efisien. Dengan adanya jaminan sistem demokrasi yang beraturan demikian itulah kesejahteraan dan keadilan dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya. (Asshdiqqie, 2006: 10-11)

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) yaitu “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan begitu rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada Negara atau kekuasaan yang diberikan pada pemerintah ataupun lembaga perwakilan. Kedaulatan ini oleh Rousseau didasarkan pada kehendak umum yang disebut “*volonte generale*” dalam praktiknya apabila, pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat akan bertindak mengganti pemerintah tersebut. Konsep dari kedaulatan rakyat sendiri lahir dengan tujuan untuk menegakkan dan menjamin kebebasan para warga negaranya, sebagaimana pendapat Immanuel Kant kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan. Sedangkan yang berhak membuat undang-undang adalah rakyat itu sendiri. Dengan begitu undang-undang merupakan bentuk dari keinginan rakyat, sehingga rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan dalam Negara itu. (Sulaiman, 2018: 83-84)

Pada hakikatnya, Negara kedaulatan rakyat dapat di implementasikan dengan faham demokrasi, faham demokrasi sendiri berkembang menjadi dua teori, yaitu;

1. Teori Demokrasi Langsung (*direct democracy*) dimana kedaulatan rakyat dapat dilakukan secara langsung dalam arti rakyat sendirilah yang melaksanakan kekuasaan tertinggi yang dimilikinya.
2. Teori Demokrasi tidak Langsung (*representative democracy*) faham ini sangat bergantung pada beberapa tuntutan lain dan biasanya berhubungan dengan konstitusionalisme: pembatasan kekuasaan pemerintah dan kebebasan politik warga Negara. (Sulaiman, 2018: 92)

Berlangsungnya kedaulatan rakyat dan demokrasi di Negara Indonesia tidak luput dengan berlangsungnya pesta demokrasi yaitu dengan cara Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, maupun Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah. sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Pasal 22 huruf E bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan dengan asas *luber judil* yaitu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pada tempo lima tahun sekali. Pemilihan Umum sendiri diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Kualifikasi hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan KPU akan sangat ditentukan oleh eksistensi institusinya. Sejumlah regulasi, silih berganti sudah dikeluarkan dan ditetapkan untuk mengukuhkan eksistensi

penyelenggara pemilu agar dapat menjamin terwujudnya seluruh asas, dalam pelaksanaan tugasnya, mulai dari asas netralitas hingga profesionalitas. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Bab VII-B Pasal 22-E Ayat (5) menyebutkan, Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pasal ini mengisyaratkan para komisioner haruslah orang-orang yang tak berkaitan dengan partai politik. Alasannya jelas, demi netralitas pelaksanaan pemilihan umum.

Pelanggaran dapat didefinisikan sebagai perbuatan (perkara) yang melanggar peraturan yang ditetapkan. Terjadinya pelanggaran dalam setiap kegiatan tidak bisa terhindarkan karena pelanggaran dapat terjadi ketika adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran dapat dilakukan banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran. Dalam Undang-undang pemilu yang berlaku, ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-undang Pemilu ini terdapat dua macam jenis yaitu pelanggaran dan kejahatan, yang mana perbuatan tersebut sudah termasuk melanggar hukum atau melanggar aturan yang berlaku. Sedangkan definisi dari pelanggaran itu sendiri dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu perbuatan tindak pidana yang lebih ringan dibanding kejahatan. (Wildan Nuril, Diakses pada 13 Juni 2019 dari <https://www.artikata.com/arti-369790-pelanggaran.html>)

Selain mengatur tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, juga mengatur tentang alat peraga kampanye. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan mengajak orang memilih Peserta Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 31 ayat (2) serta Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan untuk menjaga citra, predikat Kota Yogyakarta Berhati Nyaman serta menciptakan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye selama masa kampanye. Pemilihan Umum tahun 2019 perlu diatur Tata cara pemasangan alat peraga kampanye di dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 tahun 2018 tentang pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye pemilihan umum tahun 2019 di Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota tersebut merupakan tindak lanjut dari Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjabaran serta pemaparan latar belakang diatas adapun rumusan masalah yang akan penulis uraikan di dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam pemilihan umum diKota Yogyakarta Tahun 2019?
2. Apa yang menjadi kendala Bawaslu Kota Yogyakarta dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam pemilihan umum diKota Yogyakarta tahun 2019?

C. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2019

Sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam pemilihan umum tahun 2019 ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan partai politik, tim kampanye dan simpatisan calon Presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akan pentingnya Pemilu dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia, tentang beberapa hal teknis dalam pemasangan alat peraga kampanye untuk meningkatkan kesadaran khususnya dalam pemasangan alat peraga kampanye dalam setiap tahapan agar nantinya

tidak ada lagi pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye yang sudah diatur berdasarkan Peraturan Walikota No. 55 tahun 2018 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018 pemasangan alat peraga kampanye dalam rangka kampanye dilarang ditempatkan pada:

- a. Ruas Jalan Laksda Adi Sucipto, Jalan Urip Sumohardjo, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangurakan, Jalan Kusumanegara, Jalan Sultan Agung, Jalan Panembahan Senopati, Jalan Ahmad Dahlan;
- b. Setiap simpang yang berhubungan langsung dengan ruas sebagaimana dimaksud pada huruf a. di dalam jarak 25 (dua puluh lima) meter dari sudut simpang, kecuali di tanah persil Kantor Partai Politik dan tanah persil tempat diselenggarakannya pertemuan atau rapat peserta Pemilu;
- c. Bangunan Pojok Beteng Kraton, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan, Komplek Pemandian Taman Sari, Kawasan Istana Kraton Ngayogyakarta, Kawasan Istana Kadipaten Puro Pakualaman, Situs Warungboto dan Taman Adipura Termasuk Ruang Manfaat Jalan di depannya;

- d. Alun-alun Utara, Alun-Alun Selatan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Alun–Alun Sewandanan Kadipaten Puro Pakualaman yang meliputi lapangan dan ruang manfaat jalan di sekitarnya, kecuali pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum;
- e. Rumah Sakit, Puskesmas, Sekolah, dan Perguruan Tinggi;
- f. Tempat ibadah termasuk halaman, taman makam pahlawan;
- g. Gedung atau fasilitas milik pemerintah termasuk ruang manfaat jalan di depannya;
- h. Jembatan (termasuk jembatan kereta api dan jembatan penyeberangan), jalan layang, terminal bus, halte/shelter bus, pasar, stasiun kereta api, Tempat Khusus Parkir Ngabean, Tempat Khusus Parkir Senopati, Tempat Khusus Parkir Sriwedani, Tempat Khusus Parkir Limaran, Taman Parkir Abu Bakar Ali, Tempat Khusus Parkir Malioboro I, Tempat Khusus Parkir Malioboro II;
- i. Badan jalan, divider jalan dan median jalan; dan
- j. Tiang bendera milik Pemerintah, tiang dan papan nama jalan, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, tiang CCTV, tiang lampu antik, tiang listrik, tiang telepon, tiang APILL, taman jalan dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan.

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu secara khusus

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengatur sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam buku keempat bab I bagian kesatu dan bagian ketiga mengenai “Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, Pelanggaran Administratif Pemilu dan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu ” tercantum dalam pasal 454, 455, 460, 461, 462, 463 dan 464. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu No. 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagai mana tercantun dalam pasal 45 sampai pasal 47, adalah sebagai berikut:

Pasal 45:

- a. Pengawas Pemilu berwenang melakukan penanganan pelanggaran administrasi dalam tahapan Kampanye Pemilu.
- b. Penanganan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum.

Pasal 46:

- a. Pengawas Pemilu menjatuhkan sanksi administrasi kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
 - 2) Penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - 3) Penghentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, Media Sosial, dan lembaga penyiaran.
- b. Dalam hal terjadi pelanggaran Kampanye Pemilu tertentu Pengawas Pemilu dapat menyampaikan peringatan kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan untuk menghentikan Kampanye Pemilu tertentu yang sedang berlangsung.
- c. Dalam hal Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan tidak menindaklanjuti peringatan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.
- d. Pelanggaran Kampanye Pemilu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- 1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar jadwal;
 - 2) Penyebaran Bahan Kampanye di luar jadwal;
 - 3) Pelibatan anak dalam tahapan Kampanye Pemilu; dan

- 4) Pawai kendaraan.
- e. Pengawas Pemilu dapat menindaklanjuti peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan teguran secara tertulis kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan.

Pasal 47:

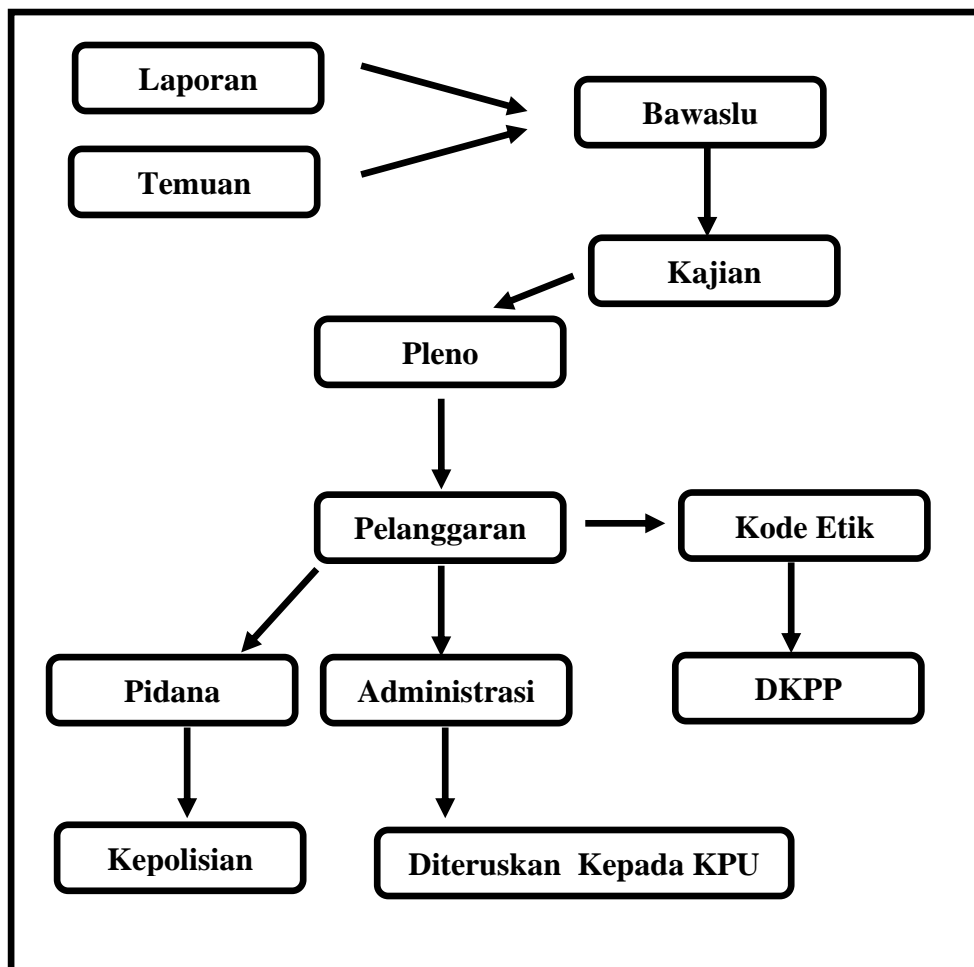
Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa panitia pemungutan suara, panitia pemilihan kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu, Pengawas Pemilu menyampaikan laporan kepada Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di atasnya secara berjenjang.

Pelanggaran yang terjadi membutuhkan suatu penanganan yang serius dari instansi yang terkait yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilu dan Kepolisian untuk berkoordinasi secara bersama-sama dalam mengatasi pelanggaran kampanye baik administratif maupun pelanggaran pidana. Untuk memudahkan dalam melakukan koordinasi ketiga instansi tersebut dalam menghadapi pelanggaran.

Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan alur penanganan terhadap pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana oleh Badan Pengawas Pemilu:

Bagan 3.1.

Alur Penanganan Terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum



Sumber: Situs Web Bawaslu kota yogyakarta, diakses pada 12 November 2019

Berikut ini penjelasan alur penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye pada pemilihan umum di Kota Yogyakarta tahun 2019:

1. Laporan Dugaan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu, dilaporkan paling lambat 7 hari sejak diketahui dan atau ditemukannya pelanggaran kepada Bawaslu.
2. Temuan adalah hasil pengawasan aktif Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran, temuan pengawas diteruskan paling lambat 7 hari sejak diketahui dan atau ditemukannya dugaan pelanggaran oleh kepada bawaslu.
3. Bawaslu menerima laporan dan atau temuan dugaan pelanggaran dan dilanjutkan dengan kajian.
4. Dalam proses pengkajian temuan atau laporan dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak yang diduga pelaku pelanggaran, saksi, dan/atau ahli untuk didengar keterangan dan/atau klarifikasinya di bawah sumpah.
5. Bawaslu melakukan pleno yang dihadiri oleh segenap anggota dari Bawaslu, pelapor, terlapor dan pihak yang berkaitan.
6. Bawaslu menyapaikan hasil kajian dan pleno terhadap berkas dugaan pelanggaran dituangkan dalam formulir model A.8 dikategorikan dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud berupa:
 - a. pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu
 - b. pelanggaran administrasi Pemilu dan/atau
 - c. tindak pidana Pemilu

7. Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. jenis-jenis pelanggaran pemilu adalah sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Kode Etik adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.
- b. Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- c. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

8. Pengawas pemilu membuat rekomendasi berdasarkan hasil pleno yang menyatakan sebuah pelanggaran atau bukan pelanggaran.

Pelanggaran diteruskan sesuai dengan jenisnya sebagai berikut:

- a. Rekomendasi dugaan Pelanggaran kode etik pemilu diteruskan oleh pengawas pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan melampirkan berkas dugaan pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran.

- b. Pengawas Pemilu menyampaikan rekomendasi dan berkas hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan. Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran Pemilihan.
- c. Berkas laporan pelanggaran dan hasil kajian terhadap pelanggaran dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Pengawas Pemilu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Pengawas Pemilu. kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sesuai tingkatan dan wilayah hukumnya. (Diakses pada 18 Desember 2019 dari <http://panwaslucurup.blogspot.com/p/blog-page.html>).

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta dalam penertiban alat peraga kampanye merujuk pada peraturan walikota Nomor 55 tahun 2018 yang dibuat untuk menentukan lokasi pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilihan umum selain itu pemasangan alat peraga kampanye harus mempertimbangkan etika, estetika kebersihan dan keindahan Kota Yogyakarta.

Partai politik atau calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota peserta pemilihan umum yang akan memasang alat peraga harus mendapatkan izin terlebih dahulu, Pemberian izin pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta untuk

memperoleh stiker sebagai tanda alat peraganya telah berizin. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018, yang berbunyi:

- a. Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.
- b. Alat Peraga Kampanye berupa baliho, billboard, videotron, cahaya, spanduk dan umbul-umbul wajib dipasang/ditempel stiker izin.

Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018 mengandung sanksi berupa teguran tertulis dari Bawaslu Kota/Panwaslu kecamatan yang berisi perintah untuk menurunkan sendiri Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang tidak sesuai ketentuan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam. Dalam hal Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan perintah yang dimaksud dilakukan penurunan/pembersihan alat peraga dan bahan kampanye tanpa pemberitahuan kepada Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye. Pelaksanaan penurunan/pembersihan Alat Peraga Kampanye atau Bahan Kampanye dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dan koordinasi Bawaslu Kota/Panwaslu Kecamatan dengan Satpol PP Kota dan Polresta.

Berikut hasil kajian yang dibuat Panwaslu Kecamatan terkait penertiban alat peraga kampanye (APK) sebanyak 702 kali dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1

Jumlah Kajian APK Kecamatan Se-Kota Yogyakarta

NO	KECAMATAN	JUMLAH KAJIAN
1	JETIS	29
2	TEGALREJO	11
3	KRATON	42
4	PAKUALAMAN	38
5	KOTAGEDE	71
6	DANUREJAN	81
7	GONDOKUSUMAN	83
8	MERGANGSAN	18
9	WIROBRAJAN	113
10	GEDONGTENGEN	5
11	UMBULHARJO	47
12	NGAMPILAN	7
13	GONDONANAN	45
14	MANTRIJERON	112
JUMLAH TOTAL KAJIAN		702

Sumber: Laporan Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu kota yogyakarta, pada tanggal 20 November 2019 dikantor bawaslu kota yogyakarta.

Berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh panwascam, kemudian Bawaslu melakukan penertiban dengan rincian jumlah alat peraga kampanye yang sudah ditertibkan di wilayah Kota Yogyakarta selama Pemilihan Umum 2019:

Tabel 3.2

Penertiban Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kota Yogyakarta

NO	Kota	Tanggal	APK yang ditertibkan
1	Yogyakarta	23 Januari	608
2	Yogyakarta	30 Januari	1048
3	Yogyakarta	13 Februari	1249
4	Yogyakarta	27 Februari	222
5	Yogyakarta	8 Maret	1347
6	Yogyakarta	14 Maret	111
7	Yogyakarta	8 April	451
8	Yogyakarta	14 April	13126
Total			19.162

Sumber: Laporan Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu kota yogyakarta, pada tanggal 20 November 2019 dikantor bawaslu kota yogyakarta.

2. Kendala Bawaslu Kota Yogyakarta dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2019

a. Perbedaan Persepsi Terhadap Kewenangan antara Bawaslu dan Satpol PP

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2018 terdapat beberapa pihak yang terlibat didalam penertiban alat peraga kampanye, mulai dari KPU Kota Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Yogyakarta, Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja . Dari beberapa pihak di atas, Satuan Polisi Pamong Praja adalah pihak yang berperan penting dalam penegakan hukum terhadap peraturan walikota tersebut. Sebab Satuan Polisi Pamong Praja adalah ujung tombak pelaksana pencabutan dan pemindahan alat peraga kampanye yang melanggar Peraturan Walikota.

Hambatan yang terjadi dalam penertiban yang dilakukan bersama Satpol PP sering kali terjadi perbedaan persepsi terkait aturan dalam penertiban seperti yang dijelaskan Muhammad Muslimin,S.Ag. S.H. selaku Komisioner Badan Pengawas pemilu, “pada saat akan melakukan penertiban alat peraga kampanye di wilayah Danurejan dan Gondomanan dari pihak satuan polisi pamong praja tidak hadir ditempat penertiban dengan alasan tidak menjadi kewenangan dari satpol pp karena tidak diatur secara jelas dalam peraturan daerah No 2

tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, pada kenyataannya menurut Bawslu Satpol PP sebenarnya adalah garda terdepan dalam hal penanganan penertiban alat peraga kampanye karena sudah tercantum jelas dalam peraturan walikota No 55 tahun 2018.

Komisioner Badan Pengawas pemilu Muhammad Muslimin S.Ag. S.H. “Menjelaskan, Penertiban alat peraga kampanye dilakukan secara bersama-sama oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dibantu instansi terkait dan wilayah. Jumlah anggota yang diturunkan dari satuan polisi pamong praja sekitar 5 orang ditambah lagi dari unsur panwascan, pihak Kepolisian dan TNI sekitar 13 orang”. “Bawaslu juga harus punya kewenangan lebih, harus memiliki perangkat untuk mengeksekusi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, sebab jika yang beraksi hanya dinas ketertiban dalam hal ini Satpol PP, maka Satpol PP tidak memiliki kewenangan untuk memberi sanksi kepada partai politik atau calon legislatif yang melanggar, mereka hanya memiliki wewenang untuk penertiban terhadap alat peraga kampanye saja. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam permasalahan ini, *pertama*, Panwaslu harus punya perangkat, sehingga tidak perlu menggunakan Satpol PP untuk mengeksekusi, *kedua*, aturannya harus dibuat lebih jelas dan tidak tumpang tindih, lalu yang *ketiga*, pemerintah dalam hal ini KPU harus menyediakan tempat untuk pemasangan alat peraga kampanye agar kedepannya partai atau peserta

pemilu dapat memansang alat peraga kampanye yang jelas sesuai peraturan.”

b. Keterbatasan Jumlah Petugas Penertiban

Upaya penertiban alat peraga kampanye partai politik dan peserta pemilu yang melanggar aturan oleh Bawaslu dan Panwascam Kota Yogyakarta dilakukan secara bertahap, terkendala oleh terbatasnya tim atau petugas yang diterjunkan dalam melakukan penertiban menjadi tidak maksimalnya proses penertiban.

Muhammad Muslimin, S.Ag. S.H. Selaku komisioner Badan Pengawas pemilu Kota Yogyakarta. “Menjelaskan, keterbatasan tim atau petugas dalam melakukan eksekusi penurunan Alat Peraga Kampanye, karena terlalu banyaknya APK yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh peraturan walikota dan jumlah petugas yang melakukan penertiban hanya berkisar 3-4 orang dalam melakukan penertiban, terbatasnya tim atau petugas dikarenakan jumlah persebaran dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang luas sehingga tim atau petugas pada waktu melakukan eksekusi harus dibagi ke beberapa wilayah sehingga menjadi tidak maksimal dalam penertiban, misalnya dalam penertiban APK Bawaslu dan dibantu dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus menurunkan dari tiang listrik atau yang diikat di pohon besar, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menurunkannya, kedepannya sebaiknya partai politik atau peserta

pemilu bisa memahami aturan yang sudah dibuat dengan tidak memasang alat peraga kampanye yang berada diatas pohon.”

c. Penolakan Masyarakat Terhadap Penertiban APK

Lemahnya penegakan hukum menjadi masalah tersendiri untuk melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat justru hanya sebagai pendukung saja. Masyarakat yang secara langsung ataupun tidak langsung turut serta dalam pemasangan alat peraga kampanye hanya mementingkan golongannya saja atau tim kampanye, sangat disayangkan bahwa sebagian besar masyarakat yang melakukan pemasangan alat peraga kampanye belum terjangkau dalam pelaksanaan sosialisasi, sehingga banyak pelanggaran terjadi oleh karena faktor dari ketidaktahuan masyarakat terhadap pelanggaran yang mereka lakukan. Setelah Bawaslu melakukan kajian dan akan melakukan penertibkan alat peraga kampanye yang dianggap melanggar aturan banyak masyarakat yang melakukan penolakan-penolakan saat dilakukannya pencopotan alat peraga kampanye oleh Bawaslu yang dibantu Satpol PP.

Menurut Muhammad Muslimin,S.Ag. S.H, “Sebagian besar masyarakat yang memasang alat peraga kampanye mempertanyakan kenapa alat peraga kampanye yang mereka pasang akan dicopot oleh Satpol PP, masyarakat beranggapan tidak menyalahi aturan karena pemasangan APK berada diwilayahnya masing-masing sehinga

masyarakat mempertahankan alat peraga kampanye yang mereka pasang karena dianggap tidak merugikan pihak manapun, namun setelah diberi penjelasan akhirnya mereka mau memahami dan bersedia APK yang dipasang untuk ditertibkan agar nantinya tidak ada kesan tebang pilih dalam proses penertiban alat peraga kampanye.”

d. Sarana dan Fasilitas Penunjang dalam Upaya Penertiban APK

Pemasangan Alat peraga kampanye dalam pemilihan umum tahun 2019 tak jarang dengan menampilkan foto calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dipasang di "billboard" atau baliho dan bendera partai politik yang dipasang dengan ketinggian tertentu dan sulit ditertibkan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dengan alasan tidak memiliki peralatan penunjang yang digunakan untuk menurunkan alat peraga kampanye yang dipasang di billboard atau baliho dan bendera partai politik.

Menurut Muhammad Muslimin, S.Ag. S.H. “Bawaslu dan Satpol PP tidak memiliki alat berat atau tangga yang tinggi untuk dapat melakukan penertiban alat peraga kampanye yang terpasang di lokasi yang tinggi, sehingga hanya bisa mencopot yang kecil-kecil saja dengan alat yang kita miliki. Alat Peraga Kampanye berupa bendera banyak dipasang pada tempat yang cukup sulit dijangkau, semisal di tiang listrik atau diatas pohon, yang tentunya Bawaslu dan petugas Satpol PP untuk pembersihan baliho dan billboard berukuran besar dilakukan

dengan menggunakan bantuan alat berat dari Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Harapan ke depannya harus ada keseriusan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyediakan peralatan penunjang kepada Bawaslu dan Satpol PP dapat memiliki sarana dan fasilitas yang lengkap dengan harapan tidak ditemukan kendala lagi pada saat pencopotan alat peraga kampanye, Semua jenis alat peraga kampanye seberapa besar bentuknya dan seberapa tinggi lokasi pemasangannya tetap harus dapat ditertibkan oleh Satpol PP.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum di Kota Yogyakarta tahun 2019 yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan mekanisme penyelesaian dalam peraturan Bawaslu, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kajian dan penertiban yang telah dilakukan Bawaslu Kota Yogyakarta, namun kedepannya para pembuat undang-undang perlu mengkaji ulang khususnya masalah pelanggaran alat peraga kampanye agar ada hukuman yang tegas kepada pelanggar.
2. Kendala Bawaslu Kota Yogyakarta Dalam Penegakan Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Dikota Yogyakarta Tahun 2019

- a. Perbedaan Persepsi Terhadap Kewenangan antara Bawaslu dan Satpol PP
- b. Keterbatasan Jumlah Petugas Penertiban
- c. Penolakan Masyarakat Terhadap Penertiban APK
- d. Sarana dan Fasilitas Penunjang dalam Upaya Penertiban APK

E. SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Adanya kejelasan kewenangan penertiban antara Bawaslu dan Satpol PP terkait pihak-pihak yang berperan langsung dalam penertiban alat peraga kampanye sesuai dengan amanat dari Peraturan Daerah dengan lembaga terkait.
2. Perlu adanya penambahan jumlah petugas oleh Bawaslu dalam melakukan penertiban serta penambahan jumlah petugas dari Satpol PP untuk memaksimalkan proses penertiban.
3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat atau simpatisan agar kedepannya dalam melakukan pemasangan alat peraga kampanye sesuai dengan tempat-tempat yang telah ditentukan dan tidak lagi adanya penolakan dari masyarakat terkait penertiban APK.
4. Adanya fasilitas penunjang untuk Bawaslu dan Satpol PP yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mempermudah proses penertiban alat peraga kampanye dan tidak banyak menyita waktu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Sulaiman, King Faisal. (2018). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusa Media.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019

C. Internet

Panwaslu kecamatan curup, diakses pada 18 Desember 2019
<http://panwaslucurup.blogspot.com/p/blog-page.html>

Wildan Nuril, diakses pada 13 Juni 2019 dari
<https://www.artikata.com/arti-369790-pelanggaran.html>